

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Cholillul Rochman Toyyib

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Article Info

Article history:

Received mm dd, yyyy

Revised mm dd, yyyy

Accepted mm dd, yyyy

Kata kunci:

MBKM

Model Implementasi

Proses Implementasi

Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

ABSTRAK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menelurkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan *hard-skill* dan *soft-skill* mahasiswa serta menciptakan link and match antara mahasiswa dengan dunia industri. Akan tetapi, kebijakan ini tak luput dari berbagai kritik dan masalah, misalnya perihal konversi satuan kredit semester (SKS) yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pihak kampus. Penulisan skripsi ini berujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan MBKM, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi gambar. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori model implementasi *top-down* yang dikembangkan oleh Meter & Horn (1975). Hasil yang diperoleh ialah proses implementasinya kurang optimal karena beberapa aktifitas berjalan dengan lancar sedangkan beberapa ada yang tidak lancar, serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni satu faktor pendukung dan satu faktor penghambat.

ABSTRACT

The Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) has launched Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) policy to improve student's hard-skill and soft-skill and to create link and match between students and the industry. However, this policy could not avoid from various criticisms and problems, such as regarding conversion of academic credits (SKS) which universities could not fully-converted. This thesis aims to describe and to analyze processes of implementing the MBKM policy; and factors which influence the implementation of the policy at Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). It applies qualitative research method with descriptive approach which contains quotations data derived from interviews, field notes, and photos documentation. The author applies theory of top-down implementation model developed by Meter & Horn (1975). It results that the implementation process is not optimal since some agendas ran without any obstacles while the other encountered some hurdles; moreover, two factors are emerged during the process, each of which is a single supporting factor and a single inhibiting one.

Keywords:

MBKM

Implementation Model

Implementation Process

Supporting Factors

Inhibiting Factors

Corresponding Author:

Cholillul Rochman Toyyib

Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: cholilbintoro@gmail.com

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) sebagai lembaga tertinggi di Indonesia dalam ranah pendidikan memiliki visi dan tujuan yang mulia dalam mengantarkan putra-putri bangsa menjadi generasi terbaik negeri. Tugas yang diemban tersebut menuntut Kemendikbud menelurkan kebijakan yang mampu meningkatkan baik *hard-skill* maupun *soft-skill* pelajar, khususnya mahasiswa.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Atas dasar itu, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan berupa program yang dapat dipilih sesuai kehendak para siswa tanpa adanya kekangan melalui Kemendikbud. Salah satu kebijakan yang populer pada periode kabinet Indonesia Maju (2019-2024) adalah Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). MBKM merupakan rancangan induk program yang memiliki beberapa sub-program.

Rancangan induk program ini menggunakan kerangka berpikir yang dicetuskan oleh John Dewey dalam *Learning by Doing Pragmatism*. Secara prinsipil, ia berpendapat bahwa siswa harus berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka supaya mampu beradaptasi dan belajar sehingga mengetahui realitas yang mereka hadapi.

Dalam konteks pendidikan hari ini, kerangka berpikir tersebut diinterpretasikan sebagai bentuk pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam praktiknya, pembelajaran yang diberikan kepada murid bukan melalui ceramah maupun diskusi, melainkan pembelajaran spontan dengan memeberikan media praktik kepada murid untuk mempelajari suatu realitas atas dasar keingintahuannya. Peran guru dalam metode ini adalah membimbing dan melatih pelajar untuk mencari dan mengolah suatu jawab secara komunikatif.

Selain itu, *link and match* antara mahasiswa dengan dunia industri atau dunia kerja menjadi pertimbangan utama mengapa program ini lahir melalui Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020. Isi Permendikbud tersebut adalah tentang hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar program studi mereka. Tiga semester yang dimaksud adalah 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

“Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centred learning*) yang sangat esensial.”

Akan tetapi, kebijakan ini tentu tak luput dari berbagai kritik dan masalah. Dalam tataran nilai, banyak pengamat yang mengkritik bahwa kebijakan MBKM hanya dilandasi oleh logika industri sehingga mengabaikan tujuan utama perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kebijakan ini kurang selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian, karena mahasiswa seolah-olah hanya dipersiapkan sebagai agen kapitalis bukan sebagai agen kemanusiaan atau agen perubahan.

Selain itu, pada praktiknya banyak masalah yang muncul, salah satunya perihal konversi satuan kredit semester (SKS) yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pihak kampus, baik dari rektorat, fakultas, maupun program studi. Misalnya ketika ada mahasiswa yang mengikuti sub-program Magang Bersertifikat di sebuah bisnis konsultan sedangkan latar belakang prodinya adalah kesehatan masyarakat. Karena latar belakang keilmuan yang tidak sama, maka kampus belum bisa mengkonversi SKS sepenuhnya. Hal semacam inilah yang menimbulkan polemik hingga detik ini.

Atas berbagai kritik dan masalah yang muncul dari kebijakan ini, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkat kebijakan MBKM ini sebagai topik skripsi. Hal ini dikarenakan penulis merupakan mahasiswa yang juga mengikuti salah satu sub-program ini selama dua semester berturut-turut.

METODE PENELITIAN

Metode dalam suatu penelitian merupakan salah satu bagian pokok dan syarat mutlak untuk mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

Peneliti melaksanakan penelitian di lingkungan UWKS dengan beberapa pertimbangan dan alasan, yaitu belum adanya penelitian terkait implementasi MBKM secara mendalam di UWKS, implementasi kebijakan ini masih menjadi polemik di beberapa prodi di lingkup kampus, misalnya dalam ranah konversi SKS, dan penulis sendiri telah menjadi peserta program MBKM dua kali di masa-masa awal implementasi MBKM di lingkup kampus.

Selain itu, peneliti juga menspesifikkan penelitian pada 2 objek saja, yaitu pihak rektorat selaku otoritas tertinggi dan penentu arah perkembangan dari perguruan tinggi melalui kebijakan yang diterapkannya. Alasan mengapa penulis juga memilih rektorat ialah karena ia yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam hal ini adalah BP3 (Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan);

Objek penelitian yang kedua adalah 4 dari 6 program studi yang menjadi *pilot project* serta mendapatkan dana hibah dari Kemdikbud dalam menerapkan MBKM di internal program studinya pada tahun 2020-2022. Keempat prodi tersebut adalah Teknik Sipil, Informatika, Teknologi Industri Pertanian, dan Akuntansi. Penulis memilih 4 prodi tersebut karena angka tersebut cukup ideal untuk mewakili berbagai prodi di UWKS dan 4 prodi tersebutlah yang pertama kali menerapkan kebijakan MBKM di lingkungan internalnya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data dalam menyajikan laporan, dimana data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto atau dokumen lainnya. Menurut Craswell, metode kualitatif adalah suatu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini karena telah mengikuti program ini di dua periode yang berbeda, sehingga dapat memudahkan dalam mengumpulkan data yang

dibutuhkan. Selain itu, peneliti telah memahami secara nyata masalah yang ada di dalamnya, dan tertarik untuk menelitinya.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Penulis menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data yang jamak digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Untuk menganalisis data yang didapatkan, penulis menggunakan kerangka yang telah ditawarkan oleh Crasswell. Pada dasarnya, metode kualitatif merubah data menjadi temuan (*finding*). Raco mengatakan bahwa analisis data memiliki arti mengatur secara sistematis bahan hasil data yang diperoleh untuk kemudian ditafsirkan, lalu menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insights dan pemahaman. Dalam konteks ini, *findings* yang diharapkan adalah bagaimana proses implementasi kebijakan MBKM di UWKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Kebijakan

Pertama-tama, harus diketahui dahulu unsur yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Unsur pertama ialah pelaksananya yang mana dari universitas melalui BP3 (Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan) sebagai eksekutornya dan prodi sebagai ujung tombaknya. Perbedaan antara BP3 dan prodi terletak pada legitimasi yang dimiliki. Tentu, BP3 memiliki legitimasi yang lebih dominan ketimbang prodi meskipun keduanya dikategorikan sebagai unit birokratik.

Lalu unsur selanjutnya yakni programnya yang berupa kebijakan MBKM sebagai induk programnya. MBKM sendiri memiliki beberapa sub-program. Sedangkan unsur yang terakhir adalah kelompok sasarannya, yaitu para sivitas akademika di dalamnya. Sivitas akademika ialah mahasiswa serta dosen yang terlibat di dalamnya.

Hal selanjutnya yang perlu diketahui ialah penulis menggunakan pendekatan implementasi *top-down* yang dikembangkan oleh Meter & Horn (1975). Penulis memilih pendekatan ini karena secara teoritik untuk mengetahui efektifitas implementasi bisa menggunakan pendekatan *top-down*. *Top-down* adalah logika berpikir dari unit birokratik atas untuk melakukan pemetaan unit birokratik di bawahnya.

Hal ini bisa dilihat dari bagaimana unsur pelaksananya yakni Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (BP3) yang berusaha untuk memanfaatkan legitimasi yang dimiliki untuk membuat perencanaan serta pengawasan kepada unit birokrasi di bawahnya yakni prodi. Selain itu, prodi selaku unit birokrasi yang legitimasinya tidak sedominan unit birokrasi di atasnya. Sehingga, prodi merasa tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakannya. Hal ini bisa diketahui secara tersirat melalui ungkapan langsung oleh Bu Watik dari BP3 sebagai berikut:

“BP3 hanya diberi amanah, sebagai wadah implementasi wadah MBKM di UWKS. Setiap pedoman dan seterusnya tetap berkoordinasi dengan bidang akademik”

Dalam proses implementasi kebijakan di level universitas melalui BP3 (Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan) hingga prodi, ada 5 aktifitas yang dilalui yang terbagi dalam 2 tahap sebagai berikut.

Tabel 1. Proses Implementasi

Tahap	Aktifitas
Perencanaan	SK Rektor
	Kurikulum
Pelaksanaan	Sosialisasi Program
	Kerjasama dengan mitra
	Pelaksanaan itu sendiri

Dalam tahap perencanaan, pertama-tama, universitas melalui BP3 selaku unit birokrasi tertinggi akan melakukan beberapa langkah awal yaitu menyusun dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Rektor No. 82 Tahun 2020 tentang MBKM di UWKS yang isinya seputar peraturan MBKM. Kemudian disusul dengan SK Rektor No. 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan MBKM di UWKS. Kedua SK tersebut merupakan perwujudan dari itikad universitas untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Harapannya prodi memiliki panduan legal yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan MBKM, sehingga implementasinya selaras dengan kehendak universitas.

Sedangkan untuk kurikulum sendiri, universitas telah melakukan sosialisasi penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). KPT yang dimaksud adalah penyesuaian antara kurikulum yang ada sebelumnya dengan kebijakan MBKM. SK Rektor yang dimaksud adalah Peraturan Rektor No. 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program MBKM di UWKS. SK inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh prodi dalam peninjauan kurikulumnya dengan program MBKM. Setiap prodi akan memperbaiki kurikulumnya menyesuaikan dengan Peraturan Rektor No. 72 di atas, sehingga prodi telah siap dalam menerapkan MBKM di prodi masing-masing. Dalam menyusun kurikulum, setiap prodi memiliki cara masing-masing. Salah satunya adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak eksternal dalam penyusunannya.

Apabila ditelisik menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Meter & Horn (1975), unsur pelaksana yakni universitas melalui BP3 telah menjalankan prosesnya dengan baik. BP3 selaku unit birokratik atas telah memanfaatkan sumber dayanya (*policy resource*) dengan baik. Sumber daya merupakan variabel utama dari model implementasinya. Sumber daya dalam hal ini adalah legitimasi politik.

Sedangkan dalam tahap pelaksanaannya, pertama-tama, BP3 selaku unit birokrasi tertinggi melakukan sosialisasi kepada unit birokrasi di bawahnya yakni prodi. Keenam prodi tersebut yang telah mendapatkan hibah juga melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika

yang terlibat di dalamnya, yakni tenaga pengajar dan mahasiswanya. Setiap prodi memiliki cara tersendiri. Proses sosialisasi di atas terbilang berjalan dengan optimal. Apabila ditelisik menggunakan model implementasinya Meter & Horn (1975), hal ini tak lepas dari variabel komunikasi antar organisasi terkait serta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya (*interorganizational communication and enforcement activities*) yang berjalan dengan baik.

Proses yang lain ialah kerjasama dengan mitra. Mitra yang dimaksud adalah pihak eksternal universitas baik dari sektor pemerintahan maupun swasta. Pada awal 2020 ketika berbagai universitas di Indonesia mulai mengimplementasikan MBKM, Kemdikbud menggandeng berbagai mitra. Hal ini berimplikasi pada timbulnya persaingan yang begitu ketat yang kemudian berdampak pada timpangnya akses yang didapatkan oleh universitas yang notabene kualitasnya bagus dengan yang masih belum bagus. Apabila ditelisik menggunakan model implementasinya Meter & Horn (1975), masalah seperti di atas muncul akibat kurang diperhatikannya variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (*interorganizational communication and enforcement activities*).

Pada perkembangannya sub-programnya akan terbagi menjadi dua, yakni MBKM *Flagship* dan MBKM Mandiri. MBKM *Flagship* merupakan beberapa sub-program yang mitranya disediakan oleh pemerintah secara langsung, yaitu kedelapan sub-program yang penulis terangkan di bab-bab sebelumnya. Sedangkan MBKM Mandiri ialah berbagai sub-program yang mitranya disediakan sendiri oleh masing-masing universitas, di antaranya ialah magang mandiri dan praktisi mengajar

Proses selanjutnya yang tak kalah penting ialah pelaksanaan itu sendiri. Pada tahap ini, berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua prodi mengalami permasalahan serupa, yaitu perihal konversi SKS. Atas dasar hal tersebut, penulis hanya membahas poin konversi SKS yang telah menjadi perhatian utama dari tahap pelaksanaan ini. Konversi SKS menjadi polemik karena ini menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh unsur kelompok sasaran yakni mahasiswa dan unsur pelaksana yakni prodi. Hal ini sudah tertuang di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang salah satu isinya perihal pengakuan hak belajar di luar kampus yang disetarakan dengan 20 SKS.

Yang menjadi polemik ialah pada proses pengakuan SKS, khususnya dari MBKM *Flagship*. Prodi akan mengakui konversi SKS apabila program MBKM yang dipilih oleh mahasiswa linier dengan mata kuliah yang ditempuh atau setidaknya sejalur dengan keilmuan prodinya. Masalahnya, kebanyakan sub-program MBKM *Flagship* yang dipilih oleh mahasiswa itu di luar lingkup keilmuan prodinya, sehingga prodi pun juga merasa keberatan untuk mengkonversi SKS meskipun itu hak yang didapatkan oleh mahasiswa.

Setiap prodi memiliki cara tersendiri untuk mencari opsi alternatif yang sekiranya tetap memberikan hak konversi SKS kepada mahasiswa tanpa menggadaikan lingkup keilmuan prodinya melalui konversi SKS tersebut. Salah satunya ialah dengan tidak memberikan konversi 20 SKS sepenuhnya. Selain itu ada juga prodi yang lebih kooperatif dengan mahasiswanya, Apabila ditelisik menggunakan model implementasi yang dikembangkan Meter & Horn (1975), problemnya ada di variabel sikap para pelaksana (*disposition of implementors*) baik dari BP3 selaku unit birokrat atas ataupun unit birokrat bawah yakni prodi.

Faktor Mempengaruhi Implementasi

Pertama-tama, harus diketahui dahulu aktor yang terlibat sehingga dapat memberikan faktor pendukung dan penghambatnya. Yang pertama yaitu BP3 selaku unit birokratik atas dan prodi sebagai unit birokratik bawah. Interaksi yang terjadi antar dua aktor ini bisa memberikan dampak positif (faktor pendukung) dan negatif (faktor penghambat) dalam implementasi kebijakan.

Tabel 2. Faktor Mempengaruhi Implementasi

Tahap	Aktifitas
Pendukung	Dukungan dari birokrasi atas (universitas melalui BP3)
Penghambat	Perbedaan persepsi antara unit birokrasi atas dan bawah

Ada satu hal utama yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi MBKM di UWKS, yaitu dukungan dari universitas secara penuh. Bagi penulis, apa yang dilakukan oleh universitas sangat logis karena Kemdikbud telah membuat permen (peraturan pemerintah) yang isinya tentang Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Salah satu IKU yang membuat perguruan tinggi memiliki dorongan supaya mahasiswanya mengikuti kegiatan MBKM ada di poin kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Apabila ditelisik menggunakan model implementasinya Meter & Horn (1975), apa yang dirasakan oleh prodi, yakni dukungan dari universitas, sangatlah lumrah. Hal ini tak lepas dari variabel sumber daya (*policy resources*) berupa legitimasi politik, yakni legal formal dan perangkat-perangkat birokrasi lainnya.

Sedangkan dalam faktor penghambatnya terdapat satu hal juga yang sangat berpengaruh dalam proses implementasinya, yaitu perbedaan persepsi tentang MBKM. Persepsi yang dimaksud ialah tentang relevansi sub-program MBKM dengan lingkup keilmuan prodi. Selain itu, perbedaan persepsi di atas juga diperburuk dengan faktor penghambat lainnya yaitu koordinasi yang kurang optimal. Apabila ditelisik menggunakan model implementasi yang dikembangkan Meter & Horn (1975), perbedaan di atas bisa terjadi karena variabel standar dan tujuan kebijakan (*policy standard and objectives*) yang berbeda.

KESIMPULAN

Selama proses implementasi kebijakan MBKM di UWKS berlangsung, unsur pelaksanaannya (*implementator*) adalah BP3 selaku unit birokratik atas dan prodi sebagai unit birokratik bawahnya; program kebijakannya berupa MBKM Mandiri dan MBKM *Flagship*; dan kelompok sasarannya (*target group*) yakni sivitas akademika khususnya mahasiswa di UWKS.

Selanjutnya, penulis mendeskripsikan proses implementasi kebijakannya berdasarkan tahap perencanaan dan pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambatnya dan menganalisisnya berdasarkan model implementasi *top-down* yang dikembangkan oleh Meter & Horn (1975).

Pada tahap perencanaan, BP3 menelurkan SK Rektor sebagai panduan serta fondasi legal dan juga mensosialisasikan kurikulum perguruan tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya, prodi melakukan sosialisasi, kerjasama dengan mitra, dan pelaksanaan itu sendiri. Faktor pendukung yang didapatkan adalah adanya dukungan penuh dari universitas, sedangkan faktor penghambatnya adalah perbedaan persepsi antara unit birokratik atas yakni BP3 dengan prodi selaku unit birokratik bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y. , and Yudi Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Aisah, Nur. "Implementasi Kebijakan Merdeka Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar)." *E-Prints Repository Universitas Negeri Makassar*, 2021.
- Bhakti, Yoga Budi, Melda Rumia Rosmery Simorangkir, Anan Sutisna, and Awaluddin Tjalla. "Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi." *Research and Development Journal Of Education* 8, no. 2 (October 2022): 783-790.
- Craswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dufour, Richard, Rebecca Dufour, Robert Eaker, W., Thomas Many, and Mike Mattos. *Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work*. 3. Bloomington: Solution Tree, 2016.
- Fauziati, Endang, and Yungga Tri Surahman. "Maksimalisasi Kualitas Belajar Peserta Didik Menggunakan Metode Learning By Doing Pragmatism By John Dewey." (Jurnal Papeda) 3, no. 2 (Juli 2021): 137-144.
- Freire, Paulo. "Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan." translated by Agung Prihantoro & Fuad Arif F., 10. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Islamy, Muh. Irfan. "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara." Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara, 2013.
- Kemendikbud. "Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka." 2020.
- Kemendikbud. *Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa*. 2021.
- Mei, Agustina, Finsensius Yesekiel Naja, and Josef Kusi. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 2066-2076.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media, 2004.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Suparlan, Henricus. "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Sumbangsihnya Bagi Pendidikan Indonesia." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2015): 56-74.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPi Bandung, 2006.

Tirto.id. *Pro dan Kontra atas Kebijakan 'Kampus Merdeka' Nadiem*. Edited by Haris Prabowo.
Januari 29, 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ingin bersyukur kepada yang Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang tak terbilang dan tak terhingga. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Galang sebagai kaprodi yang tak kenal lelah mendedikasikan dirinya terhadap ilmu pengetahuan, Pak Supaidi yang mengajarkan saya bagaimana cara menjadi hamba Tuhan yang sebaik-baiknya, dan Bu Yenik selaku dosen pembimbing skripsi saya.

Rasa terima kasih saya yang tak terhingga untuk orang terdekat yaitu orang tua saya, terutama untuk Umik yang tak pernah henti mendoakan saya dan Abah yang mendukung pendidikan saya. Tak lupa pula, saya juga bersyukur atas afeksi yang Tasya berikan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman seangkatan yang telah menemani saya belajar ilmu politik selama 4 tahun ini. Dan tak lupa kepada teman diskusi haha-hihi Andyan dan Riqo yang selalu memberikan perspektif unik dan otentiknya tentang bagaimana memandang dunia, serta Ady yang menemani begadang di detik-detik akhir ini.

Sekian ucapan terima kasih yang saya tulis. Besar harapan peneliti agar sumbangan karya dan sumbangan dalam bentuk apapun memiliki manfaat. Semoga tulisan ini menjadi manfaat kedepannya, baik sedikit maupun banyak.

PROFIL PENULIS

Sebelum mengenyam pendidikan S1 Ilmu Politik, penulis telah mengenyam D3 Bahasa Inggris di Universitas Airlangga pada tahun 2017-2021. Ketertarikan penulis terhadap politik tumbuh sejak jenjang sebelumnya, hingga kemudian untuk mempelajari kerangka keilmuan Ilmu Politik secara formal di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Nama : Cholillul Rochman Toyyib

Email : choliibintoro@gmail.com

No. WA : 081 999 962 477